BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2025-2029

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

www.perkim.pasuruankota.go.id

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/ 42 /423.011/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
b. mengumpulkan, memilah, menganalisa dan mengolah bahan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
c. menyusun dan menyempurnakan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sampai dengan penetapan;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Januari 2015

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan; dan
3. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/ 42 /423.011/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
			Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat
			Kepala Bidang Kebudayaan
		Anggota Kelompok Kerja	Fungsional Perencana
			Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
			Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menegah Pertama
			Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
			Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
			Analis Kepegawaian
			Kepala Seksi Pendidikan PAUD
			Kepala Seksi Pendidikan MAsyarakat
			Analis Pengembang Teknologi Pendidikan

1	2	3	4
			Kepala Seksi Seni Budaya Kepala Seksi Cagar Budaya
2	DINAS KESEHATAN	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian Ketua Tim Kerja Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Ketua Tim Kerja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Ketua Tim Kerja SDM Kesehatan Ketua Tim Kerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
3	RSUD Dr. R. Soedarsono	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Direktur RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Pengembangan dan Pengaduan Kepala Bidang Pelayanan Plt. Kepala Bidang Keperawatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan

1	2	3	4
			Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan Kepala Seksi Diklat dan Pengembangan Kepala Seksi Pengaduan
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Bina Marga Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Kepala Bidang Tata Ruang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala UPT. Rumah Susun Sederhana Sewa Kepala UPT. Pemakaman Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

1	2	3	4
			Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Kepala Bidang Ketentraman Umum & Ketentraman Masyarakt Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Kepala Sub Bagian Penyusun Program & Keuangan Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Seksi Pembinaan & Penyuluhan Kepala Seksi Penertiban & Pengawasan Kepala Seksi Penyidikan & Pengawasan Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pengelola bahan perencanaan Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan ahli pertama - perencana (PPPK)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja	Kepala Pelaksana Badan Penanggulaanagan Bencana Daaerah Sekretaris Badan Penanggulaanagan Bencaana Daaerah Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1	2	3	4
		Anggota Kelompok Kerja	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ahli Pertama Perencana Pengolah Data
8	DINAS SOSIAL	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Sosial Sekretaris Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Ahli Pertama - Perencana (PPPK) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
9	DINAS TENAGA KERJA	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kepala Bidang Tenaga Kerja KepalaBidang Hubungan Industrial Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (2 orang) Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ahli Pertama - Perencana (PPPK) Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran

1	2	3	4
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Ketua	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
		Sekretaris	Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
			Kepala Bidang Perlindungan Anak
			Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
			Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
		Anggota Kelompok Kerja	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
			Kepala Subbagian Keuangan
			Fungsional Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda
			Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
			Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		Sekretaris	Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan
			Kepala Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan
			Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan
			Plt. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
		Anggota Kelompok Kerja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Kepala Sub Bagian Keuangan
			Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
			Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
			Pejabat Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

1	2	3	4
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Seksi Identitas Penduduk Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
13	DINAS PERHUBUNGAN	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Perhubungan Sekretaris Dinas Perhubungan Kepala Bidang Lalu Lintas Kepala Bidang Angkutan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Seksi Lalu Lintas Kepala Seksi Perparkiran Kepala Seksi Angkutan Darat dan Terminal Kepala Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan Kepala UPT Penerangan Jalan Umum Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Analis Kebijakan Ahli Pertama Perekayasa Lalu Lintas Ahli Pertama

1	2	3	4
			Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang Layanan e-Government Kepala Bidang Statistik Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Fungsional Perekayasa Ahli Muda Fungsional Statistisi Ahli Muda Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kepala Bidang Koperasi Kepala Bidang Usaha Mikro Fungsional Pengawas Koperasi 1 Fungsional Pengawas Koperasi 2 Fungsional Kewirausahaan 1 Fungsional Kewirausahaan 2 Kepala Sug Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Ketua Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plt. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4
		Ketua Kelompok Kerja	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
			Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya
			Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
		Anggota Kelompok Kerja	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
			Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
			Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
			Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
			Fungsional Perencana Ahli Muda
			Kepala Sug Bagian Umum dan Kepegawaian
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Pariwisata
			Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
		Anggota Kelompok Kerja	Fungsional Perencana Ahli Muda
			2 (dua) orang Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
			2 (dua) orang Pelatih Olahraga Ahli Muda
			Penyusun Program dan Anggaran
			Ahli Pertama-Perencana (PPPK)
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan
		Sekretaris	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Perpustakaan
			Kepala Bidang Kearsipan
		Anggota Kelompok Kerja	Perencana Ahli Muda
			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Sub Bagian Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

1	2	3	4
			Pustakawan Ahli Muda Pustakawan Penyelia Pengelola Bahan Pustaka Pengelola Pustaka Elektronik Operator Komputer Grafis Ahli Pertama - Arsiparis
19	DINAS PERIKANAN	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan Sekretaris Dinas Perikanan Kota Pasuruan Kepala Bidang Budidaya Perikanan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Analis Akuakultur Ahli Muda Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kepala Bidang TPH Kepala Bidang Peternakan Seluruh staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepala Bidang Perindustrian Kepala Bidang Perdagangan

1	2	3	4
			Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
		Anggota Kelompok Kerja	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
			Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
			Pengawas Perdagangan Ahli Muda
			Kepala UPTD. Pasar
			Kepala UPT. Industri Logam
			Kepala UPT. Kemetrologian
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
22	SEKRETARIAT DAERAH	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
		KOORDINATOR	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
		KETUA I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
		KETUA II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
		SEKRETARIS	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
		ANGGOTA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
			Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

1	2	3	4
23	SEKRETARIAT DPRD	Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Sekretaris	Kepala Bagian Umum
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bagian Umum
			Kepala Bagian Keuangan
			Kepala Bagian Dukungan Layanan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD
		Anggota Kelompok Kerja	Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol
			Analis Kebijakan Ahli Muda
			Analis Kebijakan Ahli Muda
			Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
			Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda
			Perencana Ahli Muda
			Ahli Pertama - Perencana (PPPk)
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN DAERAH	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah
		Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
			Kepala Bidang Perencanaan Pengambangan Wilayah Perkotaan
			Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Anggota Kelompok Kerja	Fungsional Perencana Ahli Muda
			Fungsional Perencana Ahli Pertama
			Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Muda
			Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

1	2	3	4
			Analis Bangunan Gedung dan Permukiman Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ahli Pertama - Analis Kebijakan (PPPK) Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepala Bidang Anggaran Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Kepala Bidang Aset Fungsional dan sub koordinator penyusunan program dan keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	Kepala Badan Pendapatan Daerah Sekretaris Bapenda Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah Plt. Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Madya, Ahli Muda Kasubid Pelayanan Plt. Kasubid Penagihan Kasubid Pendataan dan Informasi Kasubid Pembukuan dan Pelaporan Ahli Muda Penyuluh Pajak Daerah Ahli Muda Analis Perencana Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
		Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur
			Kepala Bidang Formasi dan Mutasi
		Anggota Kelompok Kerja	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
			Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
			Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
			Ahli Pertama - Perencana (PPPK)
28	INSPEKTORAT	Ketua	Inspektur Kota Pasuruan
		Sekretaris	Plt. Sekretaris Inspektorat Kota Pasuruan
		Ketua Kelompok Kerja	Inspektur Pembantu Wilayah I
			Inspektur Pembantu Wilayah II
			Inspektur Pembantu Wilayah III
			Inspektur Pembantu Investigasi
		Anggota Kelompok Kerja	Auditor Ahli Madya Wilayah I
			Auditor Ahli Madya Wilayah II
			Auditor Ahli Madya Wilayah III
			Auditor Ahli Madya Investigasi
			Kasubag. Umum dan Kepegawaian
			Perencana Ahli Muda
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
			Ahli Pertama Perencana
29	KECAMATAN GADINGREJO	Ketua	CAMAT
		Sekretaris	Sekretaris Camat
		Ketua Kelompok Kerja	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan

1	2	3	4
		Anggota Kelompok Kerja	Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Pemberdayaan dan Sarpras Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat
30	KECAMATAN PANGGUNGREJO	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	CAMAT Sekretaris Camat Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Pemberdayaan dan Sarpras Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat
31	KECAMATAN BUGUL KIDUL	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	CAMAT Sekretaris Camat Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Pemberdayaan dan Sarpras Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat
32	KECAMATAN PURWOREJO	Ketua Sekretaris Ketua Kelompok Kerja Anggota Kelompok Kerja	CAMAT Sekretaris Camat Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Pemberdayaan dan Sarpras Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ketua Sekretaris	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

1	2	3	4
		Ketua Kelompok Kerja	-Kabid Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan -Kabid Politik Dalam Negeri -Plt. Kabid Ideologi, Waawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
		Anggota Kelompok Kerja	- Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan - Pranata Humas Ahli Muda SUBKOORDINATOR Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Pranata Humas Ahli Muda SUBKOORDINATOR Ketahanan Bangsa - Pranata Humas Ahli Muda SUBKOORDINATOR Pembinaan Politik - Ahli Pertama - Perencana (PPPK)

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya semata, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan memedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta memuat arahan, landasan hukum, tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja serta rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Semoga Renstra ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.

Pasuruan, 11 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan
Sekretaris,

AKUNG NOVAJANTO NUCH, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19721125 200312 1 006

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 10

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 16

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 20

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 26

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 26

2.6 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 31

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 31

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 31

3.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 33

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 34

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 36

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 79

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 80

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 83

BAB V PENUTUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 16

Tabel 2.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2025 22

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026 Kota Pasuruan 24

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 27

Tabel 2.6 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 29

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 32

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 34

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 35

Tabel 4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... 38

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 43

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 79

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 82

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025-2029, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka disusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2025–2045 dengan visi "*Pasuruan Kota Anugrah, Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, Harmonis Sosial Budayanya, Indah Kotanya.*" Sebagai bentuk pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045, fokus yang ditekankan mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra yakni penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Bagan alir penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi *stakeholder* terkait pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

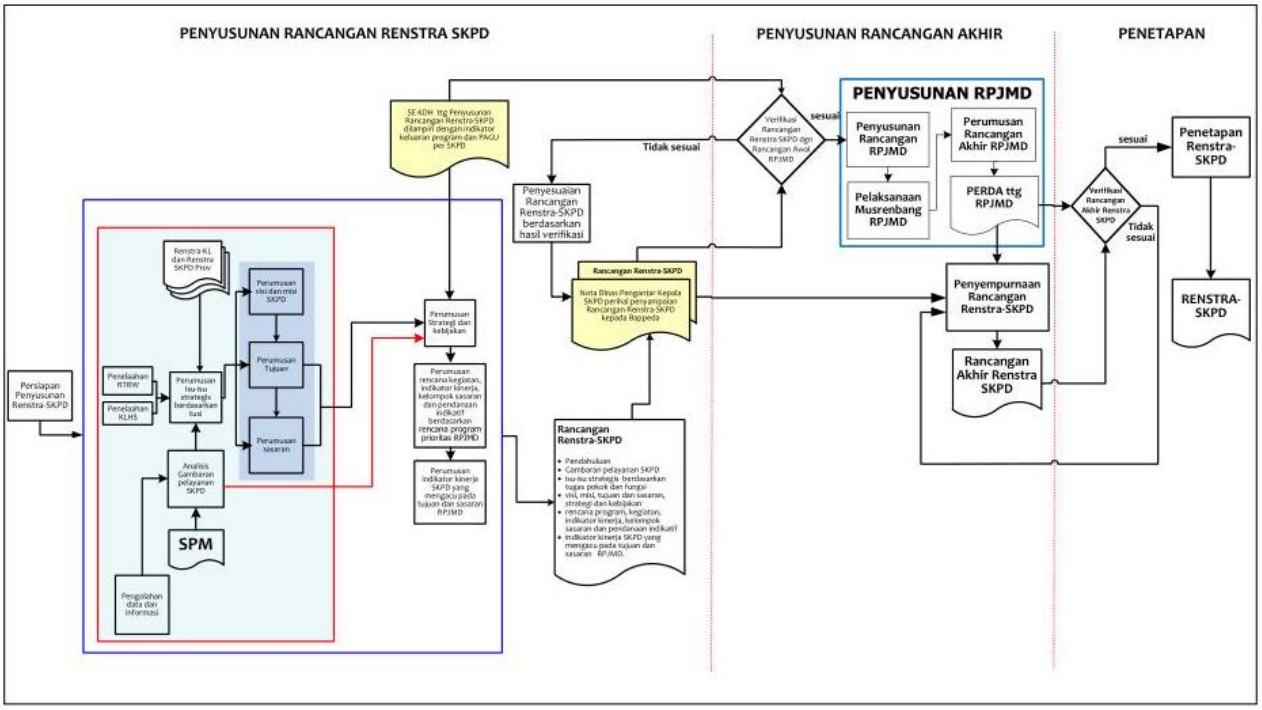

Berangkat dari komitmen untuk membangun harmonisasi dan keberlanjutan pembangunan, baik secara spasial (antar wilayah di Kota Pasuruan), maupun antar jenjang waktu tahapan pembangunan, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan, Renstra PD, Renja PD tahun berjalan, Standar Pelayanan Minimal, RT RW serta peraturan perundangan lainnya dan data pendukung sehingga diharapkan terbangun keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan daerah. Visi Pembangunan Kota Pasuruan di Tahun 2025-2029 adalah *"Pasuruan Kota Anugrah, Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, Harmonis Sosial Budayanya, Indah Kotanya."*

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi masih kurangnya pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang layak dan terjangkau, serta masih diperlukannya pembangunan dan peningkatan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman yang didalamnya terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang berdampak masih adanya kawasan kumuh perkotaan. Demikian pula permasalahan pokok air bersih meliputi rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan daerah rawan air, serta permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatas sehingga pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*sistem sewerage*) belum memadai yang dalam hal ini berdampak memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, khususnya menyangkut terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2025-2029, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan di bidang infrastruktur serta sarana dan prasarananya. Adapun yang melatarbelakangi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah berdasarkan hasil evaluasi dan review *stakeholder* terkait diperlukan adanya penyesuaian keselarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta indikator program dan kegiatan guna keterukuran kinerja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang RPJMD 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025–2045;
27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
28. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Periode 2023-2026;
31. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 100.3.3.3/42/423.011/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah memberikan gambaran informasi atas regulasi, kebijakan dan strategis serta capaian pelayanan dan permasalahan yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana berikut:

1. Sebagai pedoman dan pengarah penyelenggaraan infrastruktur di Kota Pasuruan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Wali Kota;
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029.

Tujuan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Tersedianya acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam merencanakan kegiatan tahunan selama 5 tahun ke depan.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, fungsi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/

atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Memuat penjelasan ringkas tentang sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.6 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Bagian ini mengemukakan isu stategis sesuai lingkungan dinamis baik isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, Laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra yang berisi tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 5 tahun (2025-2029).

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra yang berisi sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 5 tahun (2025-2029).

3.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Berisi strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 5 tahunan (2025-2029).

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Berisi arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 5 tahunan (2025-2029).

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisi uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD.

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berisi uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan. Pemilihan sub kegiatan untuk masing-masing Program Prioritas ini didasarkan atas Strategi dan Kebijakan Jangka menengah PD.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berisi uraian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berisi uraian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 22 B Pasuruan yang terbentuk melalui Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah "*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan*", dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
h. Pembinaan terhadap UPT.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
d. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sekretaris mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
c. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;
d. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja subbagian;
b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
f. Melaksanakan layanan perbendaharaan;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja subbagian;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan, air minum, dan air limbah. Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan pendataan dan perencanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
e. Penyelenggaraan penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perumahan, air minum, dan air limbah.

Kepala Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan kawasan permukiman;
e. Penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan bidang kawasan permukiman;
f. Pelaksanaan pencegahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan

g. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kawasan permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kawasan permukiman;
b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja UPT;
b. Menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
c. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
d. Melaksanakan teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
e. Melaksanakan ketatausahaan UPT;
f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pemakaman mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja UPT;
b. Menyiapkan petunjuk teknis pelayanan pemakaman umum;
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pemakaman umum;
d. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan makam;
e. Melaksanakan pelayanan perizinan, perpanjangan pemakaman, dan penyiapan lahan pemakaman umum;
f. Melaksanakan ketatausahaan UPT;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk susunan organisasi seperti terlihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi

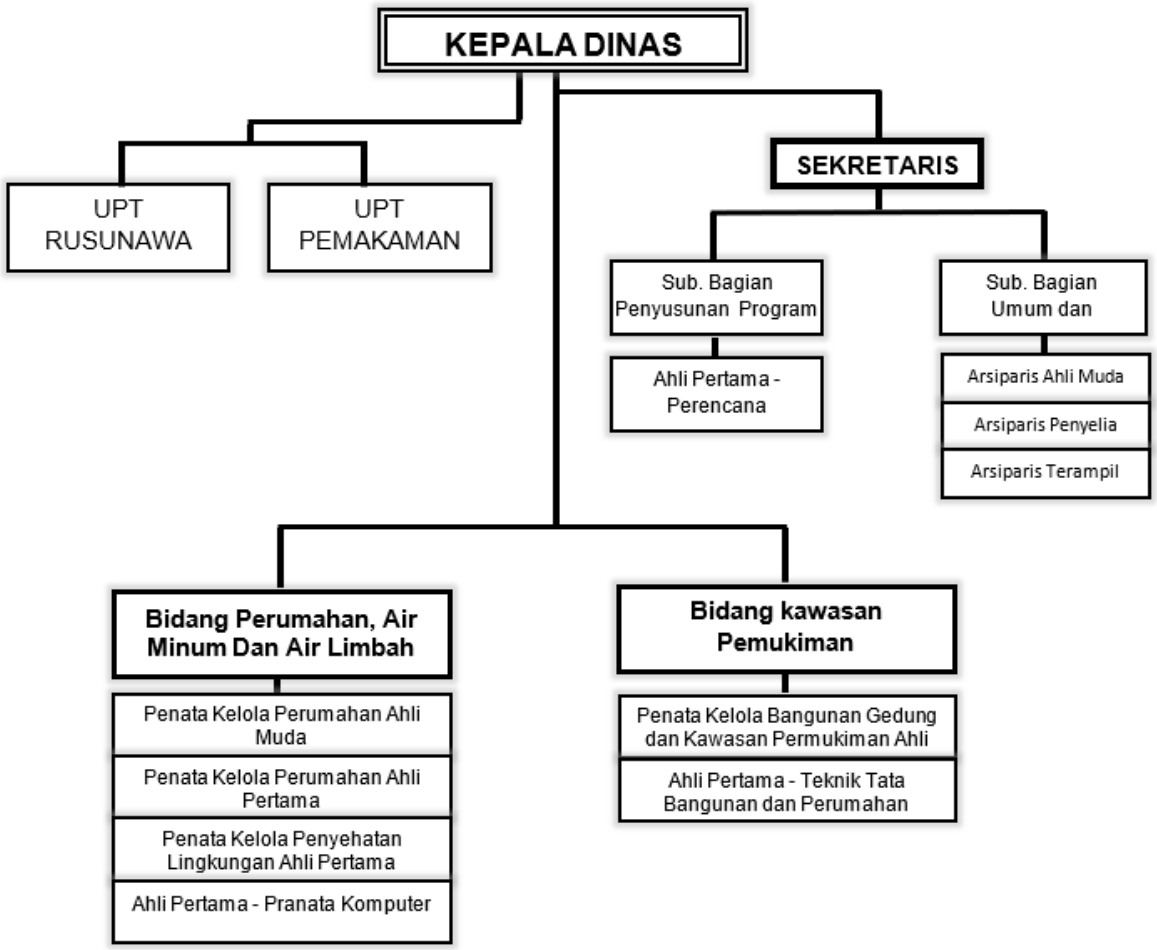

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2025)

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aset/modal meliputi bangunan gedung dan tanah, peralatan mesin, kendaraan dinas operasional.

1. Jumlah personil yang dimiliki menurut tingkat pendidikan serta pangkat dan golongan.

Menguraikan sumber daya manusia yang dimiliki PD, sebagaimana terinci dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2025

No	Komposisi Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan:		
	- Sekolah Dasar		
	- Sekolah Menengah Pertama		
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	6	
	- Diploma 1		
	- Diploma 2		
	- Diploma 3	4	4
	- Sarjana	6	9
	- Pasca Sarjana	4	4
2	Menurut Golongan		
	- Golongan I		
	- Golongan II	7	3
	- Golongan III	7	13
	- Golongan IV	4	
	- Golongan IX (PPPK)	6	1
Jumlah ASN		24	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2025)

2. Jumlah prasarana dan sarana kerja yang dimiliki (berdasarkan catatan inventaris kantor). Menguraikan ketersediaan sumber daya non manusia yang dimiliki oleh PD, sebagaimana tercatat dalam inventaris PD. Uraian ini ditabulasi dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
1	A.C. Split	Unit	22	3	25
2	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst)	Unit	10		10
3	Alat Dapur Lainnya	Unit	3		3
4	Alat Kantor Lainnya	Unit	8		8
5	Alat Pemadam/*Portable*	Unit	18		18
6	Alat Pembersih Lainnya	Unit	1		1
7	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya (Dst)	Unit	5		5
8	Alat Penghancur Kertas	Unit	2		2
9	Alat Studio Video Lainnya	Unit	1		1
10	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya (Dst)	Unit	1		1
11	Alat Ukur Lainnya Lainnya (Dst)	Unit	1		1
12	Alat Ukur *Universal* Lainnya (Dst)	Unit	1		1
13	*Brankas*	Unit	1		1
14	*Buffet* Kaca	Unit	1		1
15	*Camera Electronic*	Unit	2		2
16	*Camera* Video	Unit	3		3
17	Cctv - Camera Control Television System	Unit	9		9
18	*Concreta Mixer*/Penumbuk Beton	Unit	1		1
19	Digital Multimeter (Alat Ukur *Universal*)	Unit	2		2
20	Dispenser	Unit	2		2
21	*Exhause Fan*	Unit	2		2
22	*Faximile*	Unit	1		1

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
23	*Filing Cabinet* Besi	Unit	12		12
24	*Focusing Screen*/Layar Lcd Projector	Unit	1		1
25	Gergaji *Chain Saw*	Unit	4		4
26	Gerobak Dorong	Unit	10		10
27	*Global Positioning System*	Unit	6		6
28	Golok	Unit	20		20
29	*Gordyin*/Kray	Unit	133		133
30	*Handy Talky* (HT)	Unit	6		6
31	*Hard Disk*	Unit	3		3
32	Karpet	Unit	6		6
33	Kasur/*Spring Bed*	Unit	1		1
34	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (Dst)	Unit	1		1
35	Kipas Angin	Unit	2		2
36	Kursi Biasa	Unit	5		5
37	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1		1
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	6		6
39	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Unit	3		3
40	Kursi Lipat	Unit	34		34
41	Kursi Putar	Unit	33		33
42	Kursi Rapat	Unit	88		88
43	Kursi Tamu	Unit	12		12
44	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon II	Unit	1		1
45	Lap Top	Unit	16	3	19
46	Layar Film/Projector	Unit	1		1
47	Lemari Besi/Metal	Unit	7		7
48	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Unit	2		2
49	Lemari Es	Unit	1		1
50	Lemari Kayu	Unit	1		1

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
51	Lemari Sorok	Unit	3		3
52	*Loudspeaker*	Unit	1		1
53	Macadan Roller/ *Three Wheel Roler*	Unit	1		1
54	Meja Kerja Kayu	Unit	68		68
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	8		8
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5		5
57	Meja Rapat	Unit	3		3
58	Mesin Absensi	Unit	1		1
59	Mesin Gergaji	Unit	5		5
60	Mesin Las Listrik	Unit	1		1
61	Mesin Pemotong Rumput	Unit	15		15
62	Mesin Penghisap Debu/ *Vacuum Cleaner*	Unit	1		1
63	Mesin Penghitung Uang	Unit	1		1
64	*Microphone/ Wireless Mic*	Unit	1		1
65	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Unit	1		1
66	*Note Book*	Unit	2		2
67	P.C Unit	Unit	27	2	29
68	Papan Pengumuman	Unit	1		1
69	Papan Visual/Papan Nama	Unit	13		13
70	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Unit	9		9
71	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	3		3
72	Peralatan Studio Audio Lainnya (Dst)	Unit	1		1
73	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Dst)	Unit	1		1
74	Personal Komputer Lainnya	Unit	2		2
75	*Pick Up*	Unit	7		7
76	Pompa Air	Unit	13		13
77	*Portable Generating Set*	Unit	4		4
78	*Portable Water Pump*	Unit	1		1

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	40		40
80	Rak Besi	Unit	21		21
81	Rak Kayu	Unit	6		6
82	*Scafolding Set & Tool*	Unit	1		1
83	*Scanner* (Peralatan Mini Komputer)	Unit	1		1
84	*Scanner* (Peralatan Personal Komputer)	Unit	2		2
85	Sepeda Motor	Unit	12		12
86	Sofa	Unit	2		2
87	*Sound System*	Unit	2		2
88	*Stamper*	Unit	1		1
89	*Station Wagon*	Unit	2		2
90	*Stationary Generating Set*	Unit	1		1
91	Tablet PC	Unit	1		1
92	Tangga Aluminium	Unit	7		7
93	Telephone (PABX)	Unit	1		1
94	Televisi	Unit	6		6
95	Tenda	Unit	8		8
96	*Termometer Standar*	Unit	5		5
97	Tongkat Panjang	Unit	16		16
98	*Truck* Air	Unit	1		1
99	*Unit Power Supply*	Unit	3		3
100	*Water Pas*	Unit	1		1
Total			852	8	860

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2025)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2021-2025, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ada 2 indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan seperti terlihat pada Tabel 2.3 dan selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan seperti pada Tabel 2.4, terlampir.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√			91,64 %	93,21 %	94,77 %	96,34 %	97,90 %	87,49 %	88,24 %	88,61 %	88,61 %	-	95,47 %	94,67 %	93,50 %	91,98 %	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	√			90,15 %	90,93 %	91,71 %	92,49 %	93,27 %	88,74 %	89,43 %	90,69 %	91,14 %	-	98,44 %	98,35 %	98,89 %	98,54 %	-
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	√	√		13 rumah	35 rumah	35 rumah	35 rumah	35 rumah	25 rumah	24 rumah	14 rumah	65 rumah	-	192,31%	68,57 %	40,00 %	185,71%	-
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√	√		0 rumah	50 rumah	50 rumah	50 rumah	50 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	-	-	-	-	-	-
5	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√	Indikator Tujuan (IKU) DPRKP (baru)	-	87,95 %	88,15 %	88,35 %	88,50 %	88,12 %	88,84 %	89,65 %	87,52 %	-	-	101,01%	101,70%	99,06 %	-
6	Persentase Kawasan Bebas Kumuh		√		-	97,55 %	97,75 %	97,95 %	98,25 %	99,21 %	99,44 %	95,97 %	97,05 %	-	-	101,94%	98,18 %	99,08 %	-
7	Persentase Rumah Layak Huni (2023)			Indikator Sasaran (IKU)	97,07 %	97,45 %	97,84 %	98,22 %	98,61 %	97,02 %	97,56 %	98,10 %	98,65 %	-	99,95 %	100,11%	100,27%	100,44%	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				DPRKP (lama)															
8	Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (s/d Tahun 2022)			Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)	47,04 %	37,35 %	13,14 %	0%	0%	44,61 %	62,33 %	-	-	-	94,83 %	166,88%	-	-	-
9	Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (Tahun 2023)			Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)	47,04 %	37,35 %	13,14 %	0%	0%	-	-	4,03 %	-	-	-	-	30,67 %	-	-
10	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (Tahun 2024)			Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)	-	-	-	88,71 %	90,08 %	-	-	-	93,23 %	-	-	-	-	105,10%	-
11	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (Tahun 2024)			Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)	-	-	-	74,44 %	76,28 %			-	80,23 %	-	-	-	-	107,78%	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021 – 2026
Kota Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	3.534.354.200	8.871.111.900	1.290.779.600	1.245.279.600	928.232.100	2.664.342.100	5.535.260.460	1.030.262.676	1.196.047.222	0,00	75,38%	62,40%	79,82%	96,05%	0,00%	9,14%	(14,39%)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.872.751.968	4.873.311.953	8.189.746.840	3.483.430.568	4.229.722.420	2.985.101.709	4.078.650.615	6.929.920.314	3.042.384.340	0,00	77,08%	83,69%	84,62%	87,34%	0,00%	14,46%	(12,39%)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	138.371.200	317.327.100	237.500	237.500	237.500	138.371.200	317.327.100	237.500	237.500	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	7,35%	(17,65%)
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.975.447.621	42.028.041.237	27.051.190.800	33.444.491.549	25.342.519.692	16.844.867.485	31.299.351.571	23.082.909.706	27.355.716.698	214.500.000	84,33%	74,47%	85,33%	81,79%	0,85%	18,54%	(5,29%)
Persentase Kawasan Bebas Kumuh	20.638.542.099	38.030.241.290	33.950.158.040	40.273.239.749	16.487.442.352	17.415.403.694	29.842.741.726	28.982.567.344	34.024.322.494	214.500.000	84,38%	78,47%	85,37%	84,48%	1,30%	8,28%	(3,37%)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Rumah Layak Huni (2023)	4.920.948.632	6.651.591.222	6.803.389.660			2.991.382.663	6.512.327.612	6.676.399.559			60,79%	97,91%	98,13%			(15,64%)	5,06%
Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (s/d Tahun 2022)	20.638.542.099	38.030.241.290				17.415.403.694	29.842.741.726				84,38%	78,47%				(3,93%)	(7,16%)
Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (Tahun 2023)			33.950.158.040					28.982.567.344					85,37%			(25,00%	(25,00%)
Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (Tahun 2024)				40.273.239.749	16.487.442.352				34.024.322.494	214.500.000				84,48%	1,30%	(14,77%)	(24,84%)
Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (Tahun 2024)				28.715.781.381	20.184.565.172				23.117.285.136	214.500.000				80,50%	1,06%	(7,43%)	(24,77%)

Berdasarkan Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber anggaran yang tersedia, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya capaian kinerja yang di atas 90%. Adapun capaian kinerja yang dibawah 90% yakni Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada Tahun 2023 sebesar 30,67% dikarenakan adanya perubahan SK luas kawasan kumuh yang semakin bertambah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengembang perumahan terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman. Dalam memberikan layanan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya dengan kecamatan, kelurahan, tenaga fasilitator lapangan, PDAM, masyarakat, pengembang perumahan, dan lain sebagainya.

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Wali Kota Pasuruan, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal maupun faktor eksternal PD.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun–tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi dengan adanya peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur

dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap–tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor–faktor penentu keberhasilannya di masa datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor–faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

Penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dijelaskan pada Tabel 2.5 terlampir.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur permukiman yang memadai di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur permukiman di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum merata dan masih ada yang belum memadai	a. Masih kurangnya peran aktif pengembang perumahan dalam proses penyerahan PSU Perumahan; b. Masih diperlukannya keberlanjutan pembangunan dan peningkatan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman; c. Belum terfokusnya pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh (lokasi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengacu pada SK kumuh); d. Masih diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan kawasan kumuh baru; e. Masih diperlukannya pengembangan dan pengelolaan air limbah serta perluasan akses air minum yang layak; dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			f. Pemenuhan kebutuhan akan rumah tidak layak huni yang masih belum maksimal.

2.6 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Berikut merupakan rekapitulasi isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan memperhatikan potensi daerah dan isu yang berkembang.

Tabel 2.6
Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik perlu menjadi perhatian karena angkanya yang cenderung menurun; • Dalam urusan perumahan rakyat dan permukiman Kota Pasuruan patut diapresiasi. Terjadi peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya mengenai rumah layak huni, rumah tangga dengan akses air aman, rumah tangga dengan sistem air limbah memadai, serta tanggung jawab pemerintah dalam merehabilitasi rumah korban bencana; dan	Ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur permukiman di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum merata dan masih ada yang belum memadai.	• Optimalisasi pengelolaan persampahan serta pemerataan akses air bersih dan sanitasi layak/aman; • Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan sesuai peruntukan sebagai penunjang perekonomian dan masyarakat yang berkelanjutan; dan • Pengentasan permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan serta kebutuhan dan kualitas SDM yang unggul.	• Masih adanya lebih dari 2 miliar penduduk dunia hidup dalam negara yang mengalami masalah dalam penyediaan air (*water-stressed countries).* Selain itu, masih terdapat pencemaran air bersih akibat terkontaminasi dengan sekresi tinja; • Krisis Perumahan Global di berbagai negara yang disebabkan oleh adanya urbanisasi yang cepat, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dsb; • Lebih dari 1 miliar orang, 85% diantaranya tinggal di tiga wilayah seperti Afrika, Asia Tengah dan Selatan, serta Asia Timur dan Asia Tenggara,	Masih diperlukan upaya untuk memastikan kondisi infrastruktur dasar berupa akses rumah layak huni, akses air minum aman, akses air minum perpipaan, akses sanitasi aman, angka buang air besar sembarangan, hingga akses penanganan persampahan mampu mengejar target capaian di 2024.	• Kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; dan • Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi.	• Masih diperlukannya pengembangan dan pengelolaan air limbah serta perluasan akses air minum yang layak; • Pemenuhan kebutuhan akan rumah tidak layak huni yang masih belum maksimal; • Belum terfokusnya pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh (lokasi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengacu pada SK kumuh); • Belum optimalnya penyediaan Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan • Belum optimalnya Pengarusutamaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Salah satu pekerjaan besar pemerintah adalah dalam indikator persentase kawasan bebas kumuh perkotaan karena tren yang cenderung menurun pada lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Kota Pasuruan.			tinggal di permukiman kumuh perkotaan pada tahun 2020, yang disebabkan adanya pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi yang tinggi, dll; dan • *Green Development* (Pembangunan Hijau) yakni proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.			Gender di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, khususnya dalam hal pembinaan dan pendampingan terkait PSU, RTLH, dan pengelolaan Rusunawa serta IPLT.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja *(verb)* yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda *(noun)* yang menjelaskan objek yang menjadi perhatian

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

“**Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.”**

Dengan indikator “Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.”

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan penetapan rumusan sasaran. Adapun sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh,** dengan indikator sasaran *Persentase Bebas Kumuh*; dan
2. **Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak,** dengan indikator sasaran *Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak.*

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat ditabulasikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	• Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur • Meningkatnya PPKS yang mandiri	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87,52	85,66	86,45	87,26	87,95	88,56	89,17	
2			Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	Persentase Bebas Kumuh	97,05%	94,36%	95,48%	96,61%	97,73%	98,86%	100%	
3			Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	80,25%	75,70%	77,67%	79,39%	80,85%	82,15%	83,44%	

3.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Strategi jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil *(outcome)* program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Pemilihan strategi yang efektif dan efisien, antara lain, dilaksanakan melalui analisis SWOT (*strength*/kekuatan, *weakness*/kelemahan, *opportunity*/peluang dan *threat*/ancaman.)

Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk perangkat daerah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi tersebut dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan, meliputi:
   a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
   b. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   c. Pendampingan dan evaluasi kepada kelompok masyarakat (KSM, BKM);
   d. Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman; dan
   e. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
2. Strategi Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, meliputi:
   a. Pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
   b. Peningkatan kinerja penyelenggara SPAM.
3. Strategi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi. meliputi:
   a. Pengembangan sistem pengolahan air limbah;
   b. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
   c. Peningkatan pendidikan/sekolah lapangan bagi masyarakat atau kelompok terkait sanitasi;

d. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman;
e. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase; dan
f. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase.

Adapun penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Penunjang Perekonomian	Pengurangan Stunting	-	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Terjaminnya Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin
Pengurangan Kemiskinan				

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; dan
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan • Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	• Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah; • Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman; • Perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial; • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam kota; • Percepatan pemerataan akses layanan dan pemenuhan air minum aman dan sanitasi aman; dan • Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam kota untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan di sektor layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.	• Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam kota dengan melakukan: ➢ Perluasan akses air minum yang aman; ➢ Peningkatan akses sanitasi layak dengan pembangunan tangki septik individu dan komunal; ➢ Peningkatan kualitas dalam pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan dan Kawasan Permukiman; Guna meningkatkan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan; • Mengoptimalkan dan meningkatkan layanan sedot tinja dan pengelolaan IPLT untuk mewujudkan sanitasi aman; • Meningkatkan penyediaan bantuan sosial berupa pembangunan septictank dan RTLH yang tepat sasaran; • Mengoptimalkan fasilitasi rusunawa untuk MBR yang tepat sasaran; dan • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai gender di seluruh dalam hal pembinaan dan pendampingan khususnya terkait PSU, RTLH, dan pengelolaan Rusunawa serta IPLT.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam kerangka pembangunan *good governance* yang berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai prioritas dalam RPJMD serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititik beratkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukan kemampuan terhadap besarnya penyerapan anggaran atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada sekarang ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan serta menunjukan keberhasilan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan fokus program Walikota Pasuruan serta SPM bidang perumahan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi

pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan misi yang terkandung di dalam Renstra 2025-2029, maka rencana program kerja dapat diuraikan melalui Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Sesuai dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa program dan kegiatan menghasilkan *outcome/ output* berupa kinerja yang efektif, efisien dan dapat diukur. Maka program kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dari Tahun Anggaran 2025 dan tahun berikutnya sampai dengan Tahun Anggaran 2029 mengalami perubahan.

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya PPKS yang mandiri	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman				Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh			Persentase Bebas Kumuh		
			Meningkatnya Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak		Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai		Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa	Penyediaan Unit pengolahan setempat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.		
			Meningkatnya Pemenuhan Backlog Rumah		Jumlah Backlog Hunian	Program Pengembangan Perumahan	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Terlaksananya Program Kawasan Permukiman		Jumlah Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur		Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak			Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak		
			Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.068.816.819,00		4.655.434.906,00		3.534.034.859,00		3.473.534.349,00		3.448.004.069,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.844.079.099,00		2.359.761.805,00		1.158.922.645,00		1.146.637.685,00		1.145.734.666,00		
Meningkatnya Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	88,61%	89,28 %	1.844.079.099,00	89,44 %	2.359.761.805,00	89,59 %	1.158.922.645,00	89,75 %	1.146.637.685,00	89,91 %	1.145.734.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.844.079.099,00		2.359.761.805,00		1.158.922.645,00		1.146.637.685,00		1.145.734.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	56.646 Rumah Tangga	57.076 Rumah Tangga	1.844.079.099,00	57.176 Rumah Tangga	2.359.761.805,00	57.276 Rumah Tangga	1.158.922.645,00	57.376 Rumah Tangga	1.146.637.685,00	57.476 Rumah Tangga	1.145.734.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.844.079.099,00		2.359.761.805,00		1.158.922.645,00		1.146.637.685,00		1.145.734.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 SR	100 SR	1.844.079.099,00	100 SR	2.359.761.805,00	100 SR	1.158.922.645,00	100 SR	1.146.637.685,00	100 SR	1.145.734.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jaringan Perpipaan												PERMUKIMAN	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.224.737.720,00		2.295.673.101,00		2.375.112.214,00		2.326.896.664,00		2.302.269.403,00		
Meningkatnya Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	91,14%	91,23 %	2.224.737.720,00	91,39 %	2.295.673.101,00	91,54 %	2.375.112.214,00	91,70 %	2.326.896.664,00	91,86 %	2.302.269.403,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.224.737.720,00		2.295.673.101,00		2.375.112.214,00		2.326.896.664,00		2.302.269.403,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai	58.263 Rumah Tangga	58.323 Rumah Tangga	2.224.737.720,00	58.423 Rumah Tangga	2.295.673.101,00	58.523 Rumah Tangga	2.375.112.214,00	58.623 Rumah Tangga	2.326.896.664,00	58.723 Rumah Tangga	2.302.269.403,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				336.452.620,00		404.250.000,00		444.675.000,00		489.142.500,00		538.056.750,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	203 Rumah Tangga	192 Rumah Tangga	336.452.620,00	192 Rumah Tangga	404.250.000,00	192 Rumah Tangga	444.675.000,00	192 Rumah Tangga	489.142.500,00	192 Rumah Tangga	538.056.750,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				215.838.500,00		226.630.231,00		237.961.743,00		249.859.830,00		262.352.822,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan	26 Unit	34 Unit	215.838.500,00	34 Unit	226.630.231,00	34 Unit	237.961.743,00	34 Unit	249.859.830,00	34 Unit	262.352.822,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dipelihara												KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				104.386.000,00		284.535.864,00		290.226.581,00		296.031.113,00		301.951.735,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	99 Orang	100 Orang	104.386.000,00	100 Orang	284.535.864,00	100 Orang	290.226.581,00	100 Orang	296.031.113,00	100 Orang	301.951.735,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				1.568.060.600,00		1.380.257.006,00		1.402.248.890,00		1.291.863.221,00		1.199.908.096,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar	285 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	1.568.060.600,00	100 Rumah Tangga	1.380.257.006,00	100 Rumah Tangga	1.402.248.890,00	100 Rumah Tangga	1.291.863.221,00	100 Rumah Tangga	1.199.908.096,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAH	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.												AN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				41.894.011.969,00		32.108.255.235,00		33.775.492.029,00		33.923.875.842,00		34.549.313.883,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.053.108.867,00		7.213.053.817,00		7.476.445.362,00		7.333.421.813,00		7.374.718.733,00		
Meningkatnya Fasilitasi Kebutuhan Penunjang Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level	3 Level	7.053.108.867,00	3 Level	7.213.053.817,00	3 Level	7.476.445.362,00	3 Level	7.333.421.813,00	3 Level	7.374.718.733,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,75 Nilai	76,25 Nilai		77,75 Nilai		79,25 Nilai		80,75 Nilai		82,25 Nilai		1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.799.500,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	100%	17.799.500,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.999.600,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6 Dokumen	4.999.600,00	6 Dokumen	5.000.000,00	6 Dokumen	5.000.000,00	6 Dokumen	5.000.000,00	6 Dokumen	5.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.799.900,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	5 Laporan	12.799.900,00	5 Laporan	15.000.000,00	5 Laporan	15.000.000,00	5 Laporan	15.000.000,00	5 Laporan	15.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan				5.730.680.841,00		5.750.000.000,00		6.013.891.545,00		6.009.946.183,00		6.050.774.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah													PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	96,25%	100%	5.730.680.841,00	100%	5.750.000.000,00	100%	6.013.891.545,00	100%	6.009.946.183,00	100%	6.050.774.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.685.681.041,00		5.700.000.000,00		5.959.946.183,00		5.959.946.183,00		6.000.774.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	37 Orang /Bulan	5.685.681.041,00	37 Orang /Bulan	5.700.000.000,00	37 Orang /Bulan	5.959.946.183,00	37 Orang /Bulan	5.959.946.183,00	37 Orang /Bulan	6.000.774.666,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				44.999.800,00		50.000.000,00		53.945.362,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	44.999.800,00	17 Laporan	50.000.000,00	17 Laporan	53.945.362,00	17 Laporan	50.000.000,00	17 Laporan	50.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang	100%	100%	102.000.000,00	100%	102.000.000,00	100%	102.000.000,00	100%	102.000.000,00	100%	102.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Milik Daerah Tepat Waktu	Tersusun Tepat Waktu												PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	7.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	95.000.000,00	4 Laporan	95.000.000,00	4 Laporan	95.000.000,00	4 Laporan	95.000.000,00	4 Laporan	95.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%	100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000,00	6 Dokumen	4.500.000,00	6 Dokumen	4.500.000,00	6 Dokumen	4.500.000,00	6 Dokumen	4.500.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.814.400,00		299.500.000,00		341.000.000,00		296.921.813,00		288.403.540,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	114,72 %	100%	283.814.400,00	100%	299.500.000,00	100%	341.000.000,00	100%	296.921.813,00	100%	288.403.540,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		8.811.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	1 Paket	9.500.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	8.811.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000,00		90.000.000,00		130.000.000,00		85.921.813,00		80.311.550,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	75.000.000,00	4 Paket	90.000.000,00	4 Paket	130.000.000,00	4 Paket	85.921.813,00	4 Paket	80.311.550,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.200.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	13.000.000,00	2 Paket	13.000.000,00	2 Paket	13.000.000,00	2 Paket	13.200.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.814.400,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.295.840,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	4.814.400,00	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	5.295.840,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.974.150,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.974.150,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		19.811.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	22.000.000,00	12 Laporan	23.000.000,00	12 Laporan	23.000.000,00	12 Laporan	19.811.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	100%	0,00	100%	90.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	85.921.813,00	100%	80.311.550,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	50.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	1 Unit	30.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	30.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	1 Unit	30.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	2 Unit	25.000.000,00	0 Unit	0,00	4 Unit	35.921.813,00	3 Unit	70.311.550,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud														

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	30.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	10.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				533.348.776,00		536.053.817,00		536.053.817,00		536.053.817,00		546.148.777,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	100%	533.348.776,00	100%	536.053.817,00	100%	536.053.817,00	100%	536.053.817,00	100%	546.148.777,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.348.776,00		91.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00		91.094.960,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.348.776,00	12 Laporan	91.000.000,00	12 Laporan	91.000.000,00	12 Laporan	91.000.000,00	12 Laporan	91.094.960,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				437.000.000,00		440.053.817,00		440.053.817,00		440.053.817,00		440.053.817,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	437.000.000,00	12 Laporan	440.053.817,00	12 Laporan	440.053.817,00	12 Laporan	440.053.817,00	12 Laporan	440.053.817,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.965.350,00		501.000.000,00		459.000.000,00		364.000.000,00		362.891.750,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100%	380.965.350,00	100%	501.000.000,00	100%	459.000.000,00	100%	364.000.000,00	100%	362.891.750,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				40.000.000,00		46.000.000,00		47.000.000,00		48.000.000,00		48.147.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAH	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													AN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	40.000.000,00	1 Unit	46.000.000,00	1 Unit	47.000.000,00	1 Unit	48.000.000,00	1 Unit	48.147.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				260.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		272.000.000,00		282.777.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	19 Unit	260.000.000,00	19 Unit	265.000.000,00	19 Unit	270.000.000,00	19 Unit	272.000.000,00	19 Unit	282.777.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan				40.984.350,00		40.000.000,00		42.000.000,00		44.000.000,00		31.967.750,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peralatan dan Mesin Lainnya													PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	41 Unit	40.984.350,00	41 Unit	40.000.000,00	41 Unit	42.000.000,00	41 Unit	44.000.000,00	41 Unit	31.967.750,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.981.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	39.981.000,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.409.999.900,00		1.443.175.864,00		1.536.427.462,00		1.564.261.486,00		1.608.419.304,00		
Meningkatnya Pemenuhan Backlog Rumah	Jumlah Backlog Hunian	10.042 Unit Rumah	8.962 Unit Rumah	1.409.999.900,00	8.422 Unit Rumah	1.443.175.864,00	7.882 Unit Rumah	1.536.427.462,00	7.342 Unit Rumah	1.564.261.486,00	6.802 Unit Rumah	1.608.419.304,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.409.999.900,00		1.443.175.864,00		1.536.427.462,00		1.564.261.486,00		1.608.419.304,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	80,74%	81,45 %	1.409.999.900,00	84,43 %	1.443.175.864,00	86,01 %	1.536.427.462,00	87,15 %	1.564.261.486,00	87,64 %	1.608.419.304,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan				10.000.000,00		15.100.000,00		15.200.000,00		15.300.000,00		15.400.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAH	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemilik/Penghuni Rumah Susun													AN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	15.100.000,00	3 Laporan	15.200.000,00	3 Laporan	15.300.000,00	3 Laporan	15.400.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.399.999.900,00		1.428.075.864,00		1.521.227.462,00		1.548.961.486,00		1.593.019.304,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	1.399.999.900,00	2 Dokumen	1.428.075.864,00	2 Dokumen	1.521.227.462,00	2 Dokumen	1.548.961.486,00	2 Dokumen	1.593.019.304,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				5.672.788.900,00		4.857.382.514,00		4.931.618.206,00		4.788.444.986,00		4.695.770.315,00		
Terlaksananya Program Kawasan Permukiman	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak Huni	54.721 Unit Rumah	55.801 Unit Rumah	5.672.788.900,00	56.341 Unit Rumah	4.857.382.514,00	56.881 Unit Rumah	4.931.618.206,00	57.421 Unit Rumah	4.788.444.986,00	57.961 Unit Rumah	4.695.770.315,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5.672.788.900,00		4.857.382.514,00		4.931.618.206,00		4.788.444.986,00		4.695.770.315,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	78,47%	86,25 %	5.672.788.900,00%	90,14 %	4.857.382.514,00	94,03 %	4.931.618.206,00	97,92 %	4.788.444.986,00	100%	4.695.770.315,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				5.575.747.200,00		4.755.488.729,00		4.824.629.732,00		4.676.107.089,00		4.577.815.523,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	283 Unit Rumah	300 Unit Rumah	5.575.747.200,00	300 Unit Rumah	4.755.488.729,00	300 Unit Rumah	4.824.629.732,00	300 Unit Rumah	4.676.107.089,00	300 Unit Rumah	4.577.815.523,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				97.041.700,00		101.893.785,00		106.988.474,00		112.337.897,00		117.954.792,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	283 Laporan	1 Laporan	97.041.700,00	1 Laporan	101.893.785,00	1 Laporan	106.988.474,00	1 Laporan	112.337.897,00	1 Laporan	117.954.792,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				27.758.114.302,00		18.594.643.040,00		19.831.000.999,00		20.237.747.557,00		20.870.405.531,00		
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	83,41%	88,36 %	27.758.114.302,00	90,32 %	18.594.643.040,00	91,88 %	19.831.000.999,00	93,18 %	20.237.747.557,00	94,49 %	20.870.405.531,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	55,87%	57,82 %		59,10 %		60,38 %		61,65 %		62,93 %		1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				27.758.114.302,00		18.594.643.040,00		19.831.000.999,00		20.237.747.557,00		20.870.405.531,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	58 Lokasi	55 Lokasi	27.758.114.302,00	58 Lokasi	18.594.643.040,00	61 Lokasi	19.831.000.999,00	64 Lokasi	20.237.747.557,00	67 Lokasi	20.870.405.531,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	144 Lokasi	120 Lokasi		120 Lokasi		120 Lokasi		120 Lokasi		120 Lokasi		1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				102.873.000,00		120.000.000,00		126.000.000,00		132.300.000,00		138.915.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen	102.873.000,00	5 Dokumen	120.000.000,00	5 Dokumen	126.000.000,00	5 Dokumen	132.300.000,00	5 Dokumen	138.915.000,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				156.706.400,00		164.541.720,00		172.768.806,00		181.407.246,00		190.477.608,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0 Laporan	2 Laporan	156.706.400,00	2 Laporan	164.541.720,00	2 Laporan	172.768.806,00	2 Laporan	181.407.246,00	2 Laporan	190.477.608,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				2.989.862.452,00		3.320.704.807,00		3.652.775.287,00		4.018.052.816,00		4.419.858.098,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	4 Lokasi	100 Lokasi	2.989.862.452,00	100 Lokasi	3.320.704.807,00	100 Lokasi	3.652.775.287,00	100 Lokasi	4.018.052.816,00	100 Lokasi	4.419.858.098,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum												KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				89.770.500,00		147.111.993,00		154.467.592,00		162.190.972,00		170.300.520,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	3 Laporan	89.770.500,00	3 Laporan	147.111.993,00	3 Laporan	154.467.592,00	3 Laporan	162.190.972,00	3 Laporan	170.300.520,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				20.163.763.485,00		12.426.951.526,00		13.175.502.990,00		13.592.115.335,00		13.932.033.306,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	35 Lokasi	20 Lokasi	20.163.763.485,00	20 Lokasi	12.426.951.526,00	20 Lokasi	13.175.502.990,00	20 Lokasi	13.592.115.335,00	20 Lokasi	13.932.033.306,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				4.255.138.465,00		2.415.332.994,00		2.549.486.324,00		2.151.681.188,00		2.018.820.999,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	9 Lokasi	56 Lokasi	4.255.138.465,00	59 Lokasi	2.415.332.994,00	62 Lokasi	2.549.486.324,00	65 Lokasi	2.151.681.188,00	68 Lokasi	2.018.820.999,00	1.04.1.03.2.10.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pelaksanaannya disusun melalui penetapan program-program prioritas. Program prioritas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang kemudian disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah pada tahun rencana. Dalam hal ini tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, perumusan prioritas pembangunan daerah sebagai kerangka dalam menyusun strategi pembangunan harus dilakukan secara cermat. Untuk itu diperlukan perumusan sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan	Terlaksananya Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
2	Perbaikan Perumahan untuk Masyarakat Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Backlog Rumah	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus/ Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun; Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
		Terlaksananya Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Perbaikan Layanan Infrastruktur Dasar (Jalan, Drainase, Sanitasi dan Air Bersih)	Meningkatnya Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota / Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD; Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat;	
		Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan/ Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan; Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Data SR yang mengalami peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum terdata dengan baik ;
2. Adanya pembagian tenaga lapangan yang efektif sehingga pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal;
3. Adanya monitoring pekerjaan pembangunan Tangki Septik Komunal oleh TFL sehingga progress tiap minggunya meningkat;
4. Adanya pendampingan KSM oleh TFL dalam pelaksanaan konstruksi, koordinasi yang intens antara Dinas, Kelurahan, TFL, dan KSM, serta pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terjadwal;
5. Adanya penanganan kawasan kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD);
6. Didukung oleh adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU

Uraian tujuan dan sasaran target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks	87,52	85,66	86,45	87,26	87,95	88,56	89,17	
2.	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	80,25	75,70	77,67	79,39	80,85	82,15	83,44	
3.	Persentase Bebas Kumuh	%	97,05	94,36	95,48	96,61	97,73	98,86	100	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja dan target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Pada Tabel 4.5 berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 yang didalamnya termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Utama Pembangunan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Bebas Kumuh	%	94,36	95,48	96,61	97,73	98,86	100	IKU DPRKP
2	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	75,70	77,67	79,39	80,85	82,15	83,44	IKU DPRKP
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,42	12,06	14,69	17,32	19,96	22,59	IKD
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	49,04	51,39	53,74	56,09	58,43	60,00	IKD
5	Indeks Infrastruktur Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks	85,66	86,45	87,26	87,95	88,56	89,17	IKU DPRKP dan IKD
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	85,9	86,5	87,78	89,04	90,12	91,34	IKD
7	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota	%	89,12	89,28	89,44	89,59	89,75	89,91	LPPD
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	91,18	91,25	91,40	91,56	91,72	91,87	LPPD
9	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	LPPD
10	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	0	LPPD
11	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota yang Ditangani	%	18,063	34,450	50,838	67,225	83,613	100,00	LPPD
12	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,96	2,38	1,81	1,23	0,65	0,08	LPPD
13	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	70,69	70,77	70,84	70,91	70,98	71,05	LPPD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	%	70,00	70,59	71,15	71,70	72,22	72,73	LPPD
15	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100,00	21,31	30,28	40,97	50,47	61,47	LPPD
16	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	%	70,00	70,59	71,15	71,70	72,22	72,73	LPPD
17	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	33,33	50,00	66,66	83,33	100,00	100,00	LPPD
18	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	LPPD
19	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	%	-	-	-	-	-	-	LPPD

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk lima tahun ke depan. secara teknis Renstra ini akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi terkait kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Renstra ini menjadi sangat penting, artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Govermance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya ke bawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dengan tersusunnya Renstra Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Renstra Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja PD yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Apabila diperlukan, maka dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Pasuruan, 11 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan
Sekretaris,

AKUNG NOVAJANTO NUCH, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19721125 200312 1 006